

BPKH Kelola Dana Haji Rp165 T, Jokowi: Ingat Kasus Jiwarsaya

JAKARTA (IM) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebut Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menjadi pusat perhatian masyarakat. Sebab, BPKH saat ini mengelola dana haji yang sangat besar.

"Badan pengelola keuangan haji ini kinerja dan gerak geriknya selalu menjadi pusat perhatian masyarakat. Kenapa? karena mengelola dana haji dengan jumlah yang sangat besar," kata Kepala Negara saat memberi arahan pada Raker dan Milad ke-6 BPKH, di Istana Negara, Selasa (12/12).

Jokowi pun meminta BPKH untuk berhati-hati dalam mengelola uang umat yang jumlahnya Rp165 triliun.

"Tadi disampaikan oleh kepala Pak BPKH Rp 165 triliun. gede banget dana yang dikelola. Jadi saya titip hati-hati

mengelola uang yang ada di BPKH," kata Jokowi.

Jokowi menyebut, investasi 75% dari dana tersebut kepada SBSN dinilai merupakan langkah yang tepat. Tapi, BPKH jangan sampai terjerumus kepada saham gorengan yang menjerat Jiwarsaya.

"Jangan sampai seperti yang lain-lain. Diinvestasikan di saham, yang sahamnya digoreng-goreng, hilang uangnya. Ingat Jiwarsaya, selalu saya ingatkan itu. Jangan sampai berkasus seperti itu. Saya titip hati-hati mengelola dana umat ini," tegasnya.

"Supaya kita merenung semua. Ini uang besar yang diamankan ke BPKH, kelola dengan baik," kata Jokowi. ● han

Elektabilitas PKB, Nasdem, PKS dan Demokrat Alami Penurunan

JAKARTA (IM) - Survei Litbang Kompas Desember 2023 menunjukkan elektabilitas sejumlah partai politik (parpol) mengalami penurunan jika dibandingkan survei yang dilakukan pada Agustus 2023.

Meski mengalami penurunan yang tak signifikan, elektabilitas Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berada di urutan keempat dengan raihannya 7,4 persen. Sementara, pada survei Agustus 2023, elektabilitasnya 7,6 persen.

Partai Nasdem juga mengalami penurunan. Pada Agustus elektabilitas 5,9 persen, namun survei Litbang Kompas terbaru elektabilitasnya 1 persen jadi 4,9 persen.

Sedangkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) deketabilitasnya juga turun jadi 4,5 persen dari sebelumnya pada Agustus 6,3 persen.

Penurunan elektabilitas yang relatif signifikan dialami Partai Demokrat. Tingkat keterpilihan Partai pemenang Pemilu 2009 menurun hingga 2,5 persen. Pada survei kali ini, Partai Demokrat meraih 4,5 persen. Pada Agustus 2023, elektabilitas Demokrat masih 7 persen.

Adapun peringkat tiga teratas elektabilitas parpol diduduki oleh Partai Gerindra (21,9 persen), PDI-P (18,3 persen), dan Partai Golkar (8 persen). ● han

FOTO: ANTARA



IMIGRAN ROHINGYA MENUNGGU RELOKASI

Para pengungsi imigran Rohingya yang terdampar di pantai Lamreh Kabupaten Aceh Besar masih menempati Balee Meurseuraya Aceh (BMA) di Banda Aceh, Aceh, Selasa (12/12). Sebanyak 137 orang imigran etnik Rohingya menunggu relokasi dan penangan lanjutan dari Pemerintah dan UNHCR setelah mendapat penolakan dari warga di Kabupaten Aceh Besar, Pidie dan Kota Banda Aceh.

Bebas Bersyarat, Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Dapat Remisi 6,5 Bulan

JAKARTA (IM) - Mantan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin ternyata sudah ke luar dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Tangerang sejak 18 Agustus 2023.

"Azis bebas setelah mendapat Surat Keputusan Pembebasan Bersyarat (PB) dengan nomor: PAS-1436.PK.05.09 Tahun 2023 tanggal 17 Agustus 2023," kata Koordinator Humas dan Protokol Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen Pas) Kementerian Hukum dan HAM, Deddy Eduar Eka Saputra, Selasa (12/12).

Selama menjalani pidana, Azis Syamsuddin dinilai berkelakuan baik berdasarkan sistem penilaian pembinaan narapidana. Politikus Partai Golkar itu mendapat remisi atau pengurangan masa hukuman sebanyak enam bulan 30 hari.

"Selama menjalani Pembebasan Bersyarat (PB), yang bersangkutan wajib lapor ke

Balai Pemasyarakatan Kelas I Tangerang," kata Eduar.

Azis diantarkan di Lapas Kelas I Tangerang untuk menjalani pidana selama tiga tahun dan enam bulan. Ia dinyatakan terbukti melakukan suap senilai total Rp 3,6 miliar pada mantan penyidik KPK Stepanus Robin dan seorang pengacara bernama Maskur Husain agar tidak dijadikan tersangka kasus korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) di Kabupaten Lampung Tengah.

Suap itu diduga diberikan bersama kader Partai Golkar lainnya bernama Aliza Gunado. Dalam perkara ini, Azis terbukti melakukan tindak pidana korupsi sesuai dakwaan alternatif pertama yakni Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP. ● mei

2 Polhukam

FOTO: ANTARA



MENHAN SERAHKAN LIMA UNIT PESAWAT TERBANG NC-212I KE TNI AU

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melakukan penyiraman ke hidung pesawat NC-212i saat serah terima pesawat terbang NC-212i untuk TNI AU di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (12/12). Menhan menyerahkan lima unit pesawat terbang NC-212i yang dirakit oleh PT Dirgantara Indonesia (DI) kepada TNI AU Skadron Udara 4 Wing Udara 2 Lanud Abdulrachman Saleh, Malang, Jawa Timur.

Rampas Uang Koruptor, Kejaksaan Butuh Didukung UU Perampasan Aset

Selama ini Kejagung tidak bisa maksimal mengembalikan kerugian uang negara yang dikorupsi karena tak ada UU Perampasan Aset.

JAKARTA (IM) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong DPR bersama Pemerintah segera mensahkan RUU Perampasan Aset. Jokowi menekankan bahwa RUU tersebut penting untuk segera disahkan.

"Saya harap pemerintah dan DPR dapat segera membahas dan menyelesaikan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana ini," kata Kepala Negara saat memberi kata ambuatannya pada puncak Hari Anti-Korupsi Sedunia (Hakordia) 2023 di Istana Senayan, Jakarta, Selasa (12/12).

Menurut Presiden Jokowi,

RUU Perampasan Aset penting untuk disahkan, karena akan menjadi sebuah mekanisme untuk pengembalian kerugian negara.

"Karena ini adalah sebuah mekanisme untuk pengembalian kerugian keuangan negara dan bisa memberikan efek jera," kata Jokowi. Selain RUU Perampasan Aset, mantan Gubernur DKI Jakarta juga mendorong segera disahkannya RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal.

"Kemudian UU Pembatasan Transaksi Uang Kartal, yang mendorong pemanfaatan transfer perbankan

semua akan lebih transparan akuntabel," tuturnya.

Seperti diketahui, selama ini pihak Kejaksaan Agung (Kejagung) kerap terkendala ketika menelusuri aset para koruptor. Sehingga Kejagung tidak bisa maksimal mengembalikan kerugian uang yang dikorupsi.

"Problemnya Kejaksaan seringkali mengalami kendala dalam melakukan penelusuran aset terpidana (asset tracing) sehingga tidak dapat dilakukan penyitaan," kata pengamat hukum dari Pusat Studi Kejahatan Ekonomi Universitas Islam Indonesia (UII), Ari Wibowo, dalam keterangannya, dikutip Selasa (12/12).

Ia sangat mendukung upaya Kejagung dalam memaksimalkan pemulihan aset pada kasus korupsi. Namun, Ari menekankan bahwa kesulitan

dalam penelusuran aset terpidana seringkali menghambat penyitaan, sehingga upaya pengembalian aset negara belum mencapai tingkat efektivitas yang diinginkan.

Indonesian Corruption Watch (ICW) mencatat bahwa pemulihan kerugian negara masih jauh dari optimal. Pada 2021, kerugian keuangan negara akibat korupsi mencapai Rp62,9 triliun, namun pidana uang pengganti yang dijatuhkan pengadilan hanya sekitar 2,2 persen dari total

tersebut, yakni Rp1,4 triliun.

"Itu saja tidak semua yang pengganti tersebut dibayarkan," katanya.

Pemulihan aset juga dilakukan melalui perampasan selain pidana uang pengganti. Namun, Ari mengkritisi bahwa upaya ini masih belum maksimal, terlihat dari kasus PT Asuransi Jiwarsaya. Meskipun kerugian negara mencapai lebih dari Rp16 triliun, hingga Januari 2023, hanya sekitar Rp 3 triliun aset yang berhasil dikembalikan. ● han

Soal Keamanan Warga Tionghoa, Cawapres Gibran: Saya yang Jamin ...

JAKARTA (IM) - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, yang berpasangan dengan calon presiden (capres, Prabowo Subianto, menjanjikan keamanan masyarakat Tionghoa di Indonesia, jika mereka memenangkan Pilpres 2024.

Hal tersebut Gibran sampaikan di hadapan ratusan umat Kristiani dalam acara "Gibran Menyapa Umat Kristiani" di Nafri Discipleship Church (NDC) Central Park, Jakarta Barat, Senin (11/12) malam.

Wali Kota Solo ini menjamin keamanan masyarakat Tionghoa ketika ditanya apakah pasangan Prabowo Subianto-Gibran akan menjamin keamanan mereka jika berhasil menjadi presiden-wapres.

"Aman, bapak/ibu. Aman, aman, aman. Yang jamin saya. Aman, bapak/ibu tenang saja," ujar Gi-

bran disambut tepuk tangan.

Kemudian, Gibran menjawab pertanyaan lain seputar pembubaran ibadah ataupun pembangunan gereja di sejumlah daerah. Berdasarkan pengalamannya sebagai Wali Kota Solo, Gibran mengatakan, selama syaratnya lengkap, gereja pasti mudah dibangun.

"Kalau ada penolakan-penolakan, sekali lagi, di setiap daerah itu kan ada FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) yang terdiri dari semua tokoh, tinggal duduk bareng saja Permasalahannya apa, duduk bareng RT/RW, Kuncinya cuma komunikasi. Itu saja," tuturnya.

Menurut Gibran, ketika ada penolakan atau penyelesaian terhadap rumah ibadah di Solo, solusinya hanyalah duduk bersama.

"Dari situ, kata dia, mereka akan bersama-sama berkomunikasi untuk mencari solusi. ● han

Sholawat Kebangsaan di Malang, Masyarakat Doakan Ganjar-Mahfud

MALANG (IM) - Relawan Sahabat Ganjar menggelar Sholawat Kebangsaan, di Stadion Gunung Kembar, Kelurahan Turen, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Acara tersebut dihadiri ribuan warga Malang dan sekitarnya.

Gus Ali Gondrong, pendiri Mafia Sholawat, memulai acara dengan penuh semangat. Ia mengajak hadir menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars NU Yalal Waton, seraya mengajak jamaah untuk berfoto bersama.

Dalam kesempatan tersebut, Gus Ali Gondrong menyampaikan pesan perdamaian menjelang pemilihan presiden bulan Februari mendatang.

"Kali ini, saya bersama Sahabat Ganjar hadir di Kabupaten Malang, malam ini hari ini kita bersholawat bersama agar kita bangsa Indonesia mendapatkan pemimpin yang amanah, seperti Bapak Ganjar dan Bapak Mahfud MD," ujar Gus Ali Gondrong dalam keterangannya.

Sementara Milenial Malang Raya, Asandra Salsabila mengungkapkan harapan, melalui Sholawat Kebangsaan bisa membawa Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menjadi Presiden dan Wakil Presiden pada 2024 mendatang.

"Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita berkumpul dalam acara Sholawat Kebangsaan Ganjar Mahfud Presiden Pilihanku 2024, dengan tujuan untuk berholawat kepada Nabi Muhammad SAW, kita juga berdoa untuk mendapatkan pemimpin yang amanah untuk memimpin Indonesia dan khususnya mendoakan Bapak Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menjadi Presiden 2024," ujarnya.

Relawan Sahabat Ganjar menyampaikan terima kasih kepada semua yang telah mendukung dan ikut serta dalam kesuksesan acara Sholawat Kebangsaan. Doa bersama untuk keselamatan bangsa dan negara menandai penutupan acara. ● mei

FOTO: ANI



RAKORNAS PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM KELAUTAN DAN PERIKANAN Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono (kiri) melihat senapan api saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan dan Penegakan Hukum Bidang Kelautan dan Perikanan di Jakarta, Selasa (12/12). Dalam hal pengawasan serta meningkatkan estimasi pasar produk perikanan tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menetapkan lima arah kebijakan ekonomi biru yang menempatkan ekologi sebagai panglima.

PENGUMUMAN

Memperhatikan ketentuan pasal 20 UU No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, dengan ini diberitahukan bahwa akan dilakukan penjualan di bawah tangan, berupa :

Tanah & Bangunan SHM No. 07943 a.n Agus Winianto terletak di Komplek Residence One Cluster Red Diamond, Jalan Red Diamond 1 No. 28, Kel. Jalupang, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Prop. Banten.

Apabila terdapat pihak yang berminat atau merasa keberatan atau berkepentingan terhadap penjualan di bawah tangan agunan objek tersebut di atas dapat menghubungi sbb :

- PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Collection & Recovery Center Jakarta, selaku Pemegang Hak Tanggungan di alamat Wisma Mandiri 2, Lantai 17, Jl. Kebon Sirih No 83, Jakarta Pusat.

- Agus Winianto, selaku Pemberi Hak Tanggungan, di alamat Komplek Residence One Cluster Red Diamond, Jalan Red Diamond 1 No. 28, Kel. Jalupang, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Prop. Banten.

Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterbitkannya pengumuman ini.

(Agus Winianto)